



**REVIEW RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PERWILAYAHAN INDUSTRI TAHUN 2020 – 2024
(Periode 2022)**

1. Pendahuluan

Pandemi covid-19 yang menghantam Dunia sejak Tahun 2020 memberikan gejolak pada perekonomian tiap negara, tak terkecuali Indonesia. Namun, di akhir tahun 2022 ini, Pemerintah telah resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pencabutan ini diambil karena pemerintah melihat situasi pandemik yang makin terkendali dan tingginya cakupan imunitas penduduk Indonesia. Kebijakan baru ini tentu menjadi angin segar bagi para pelaku usaha khususnya Industri di Indonesia.

Sektor Industri masih menjadi tulang punggung dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dalam tren positif pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sejak tahun 2021 dan terus berlanjut di tahun 2022 dimana pada TW-I terjadi pertumbuhan sebesar 5,47%, TW-II sebesar 4,33%, dan TW-III sebesar 4,83%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia bisa melewati tantangan dan gejolak perekonomian yang disebabkan pandemik covid.

Adapun kebijakan yang diterapkan Kementerian Perindustrian agar industri dapat bertahan adalah melalui fasilitasi penerbitan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), peningkatan kemampuan industri dalam negeri dalam mendukung penanganan Covid-19 (khususnya industri farmasi untuk penyediaan obat-obatan terapi Covid-19, dan alat Kesehatan), program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), salah satunya melalui program BBI (Bangga Buatan Indonesia), serta melanjutkan program substitusi impor 35 persen pada tahun 2022, melalui penurunan impor yang dilaksanakan secara simultan dengan peningkatan utilisasi produksi, mendorong pendalaman struktur industri, dan peningkatan investasi.

Kondisi ekonomi global di tahun 2023 yang diprediksi akan terjadi resesi mengakibatkan Pemerintah perlu melakukan strategi melalui efisiensi anggaran namun kinerja output tetap meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan yaitu dengan *automatic adjustment* anggaran dalam rangka mempertimbangkan kondisi geopolitik global. Disamping itu juga pemerintah dituntut agar kinerja ekonomi tetap meningkat. Untuk itu, Pemerintah menyusun arah kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia.

Dalam rangka menghadapi tantangan industri pengolahan ke depan antara lain terhadap kompleksitas produk, partisipasi dalam *Global Value Chain*

(GVC) dan *Outward Looking* serta Penerapan Standar berikut rancangan arah kebijakan pembangunan sektor industri yang akan dilakukan yaitu:

- a) Harmonisasi kebijakan lintas sektor guna mendukung **diversifikasi produk ekspor yang lebih kompleks**
- b) **Peningkatan hilirisasi SDA** untuk peningkatan ekspor produk bernilai tambah yang didukung oleh **operasionalisasi Kawasan Industri Prioritas**
- c) **Perluasan penerapan industri 4.0 dan transformasi digital** dalam proses bisnis dan produksi perusahaan
- d) Peningkatan **inovasi dan riset industri**
- e) **Peningkatan partisipasi** industri domestik (termasuk IKM) **dalam rantai pasok global**
- f) **Peningkatan produktivitas dan kapabilitas tenaga kerja** industri (termasuk dalam hal adopsi teknologi) melalui penyediaan pelatihan teknis sesuai kebutuhan perusahaan
- g) **Perluasan penerapan industri hijau dan industri yang mendukung ekonomi biru**
- h) **Pengembangan industri dan infrastruktur halal** melalui penguatan standar kualitas, rantai pasok, dan Kawasan Industri Halal terintegrasi
- i) **Penguatan infrastruktur industri dan pendukungnya** guna peningkatan daya saing industri nasional
- j) **Gerakan penggunaan produk dalam negeri**

Arah kebijakan pembangunan sektor industri diatas perlu didukung dengan konsolidasi kebijakan baik dari sisi penawaran, permintaan dan iklim usaha, melalui peningkatan investasi, ekspor dan penguatan rantai pasok, penguatan faktor produksi, optimalisasi pasar dalam negeri dan belanja negara, serta penguatan iklim usaha. Strategi yang akan dijalankan adalah:

- Penjajakan, Pendampingan dan Pengawasan Investasi pada Sektor Prioritas
- Pengembangan **Kawasan Industri Terintegrasi dan Infrastruktur Industri**
- Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri 4.0 pada Sektor Prioritas
- Mendorong Pengembangan **Industri Hijau – Circular Economy**
- Pengembangan Industri Kecil dan Menengah secara Komprehensif

Dengan adanya arah kebijakan pembangunan sektor industri untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia tersebut, utamanya terkait kawasan industri prioritas, infrastuktur industri, kawasan industri halal terintegrasi, serta pengembangan industri hijau, maka Direktorat Perwilayahan Industri sebagai bagian dari organisasi Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas pengembangan perwilayahan industri perlu melakukan review Rencana Strategis agar relevan dengan kondisi terkini dan selaras dengan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024.

2. Pembahasan

Sejak ditetapkan pada tahun 2020, Renstra Direktorat Perwilayahan Industri Tahun 2020-2024 telah mengalami satu kali perubahan (Perdirjen Nomor 3/KPAII/PER/I/2022 tanggal 31 Januari 2022). Perubahan ini disebabkan oleh perubahan pada Renstra Kemenperin dan Renstra Ditjen KPAII. Terdapat beberapa indikator kinerja baru yang diturunkan dari kinerja Kementerian Perindustrian dan kinerja Ditjen KPAII serta meningkatkan level indikator yang masih output menjadi outcome. Setelah melakukan evaluasi kegiatan tahun 2022 serta masukan dari hasil pemeriksaan/audit kinerja, maka perlu dilakukan *review* guna memperbaiki/menyesuaikan kembali beberapa indikator kinerja sesuai dengan perkembangan pencapaian kinerja terkini. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja pada tahun 2020 - 2022 juga menjadi pertimbangan diperlukannya *review*/perubahan terhadap Renstra Dit. PI Tahun 2020-2024.

Adapun hasil pembahasan terhadap indikator kinerja utama pada akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Industri (KI) Prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi

Capaian:

Dari target 15 kawasan industri secara kumulatif tercapai 14 kawasan industri, yaitu: Tahun 2019 tercapai 8 KI sebagai baseline (KI Sei Mangkei, KI Dumai, KI Batu Licin, KI Bitung, KI Morowali, KI Palu, KI Bantaeng, dan KI Konawe); Tahun 2020 tercapai sebanyak 4 KI (KI Sadai, KI Ladong, KI Wedabay, dan KI Ketapang); Tahun 2021 tercapai 1 KI (KI Tanjung Enim); Tahun 2022 tercapai 1 KI (Kalimantan Industrial Park Indonesia). Sementara itu, terdapat 3 KI yang diterbitkan IUKI namun tidak termasuk dalam prioritas RPJMN, yaitu: Batuta Chemical Industrial Park, Semesta Cipta Internasional dan KI Nusantara Industri Sejati.

Analisis:

Indikator telah menggambarkan kinerja/hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta berupa outcome. Capaian belum memenuhi target, namun masih dalam kemampuan untuk mencapainya di waktu-waktu mendatang.

Hasil Review:

Indikator kinerja dan target kinerja masih relevan.

2. Jumlah kawasan industri yang dikembangkan

Capaian:

Dari target 26 kawasan industri secara kumulatif tercapai 26 kawasan industri, yakni: Tahun 2019 tercapai 15 KI (KEK Tanjung Api-Api, KI Landak, KI Ketapang, KI Tanggamus, KEK Maloy, KI Bantaeng, KEK Bitung, KI Morowali, KI Konawe, KI Buli, KI Kendal, KI JIPE, KI Dumai, KI Wilmar Serang, dan KEK Lhokseumawe); Tahun 2020 tercapai 3 KI (KI Teluk Bintuni,

KI Brebes dan KI Jorong); Tahun 2021 tercapai 4 KI (KI Ladong, KI Sei Mangke, KI Tenayan, KI Tanjung Buton); dan Tahun 2022 tercapai 4 KI (KI Palu, KI Sadai, KI Weda, KI Batang)

Analisis:

Indikator telah menggambarkan kinerja/hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta berupa outcome. Adapun capaian kinerja sebesar 26 kawasan industri telah memenuhi target yang ditetapkan.

Hasil Review:

Indikator kinerja dan target kinerja masih relevan.

3. Fasilitasi kawasan industri dengan zona tematik

Capaian:

Dari 2 kawasan industri (secara kumulatif) yang menjadi target tercapai 3 Kawasan Industri Halal, yakni: KI Modern Cikande Industrial Estate, KI Kawasan Industri Safe n Lock, dan KI Bintang Inti.

Analisis:

Indikator telah menggambarkan kinerja/hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta berupa outcome. Adapun capaian kinerja sebesar 3 kawasan industri telah melampaui target yang ditetapkan.

Hasil Review:

Indikator kinerja dan target kinerja masih relevan. Karena target sampai 2024 jumlahnya 3 KI dan telah tercapai di tahun 2022, maka target 2023 diubah menjadi 4 KI dan target 2024 menjadi 5 KI.

4. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dikembangkan

Capaian:

Dari target 3 WPPI yang dikembangkan, telah tercapai 3 WPPI yaitu WPPI Riau, WPPI Jawa Barat dan WPPI Jawa Tengah.

Analisis:

Indikator telah menggambarkan kinerja/hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta berupa outcome. Adapun capaian kinerja sebesar 3 WPPI telah memenuhi target yang ditetapkan.

Hasil Review:

Indikator kinerja dan target kinerja masih relevan.

5. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan

Capaian:

Dari target 4 KPI, tercapai 5 KPI yaitu Kab. Muaro Jambi, Prov. Sulawesi Tengah, Kab. Purwakarta, Prov. Bali dan Prov. Jatim. Capaian kinerja indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan.

Analisis:

Indikator telah menggambarkan kinerja/hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta berupa outcome. Adapun target KPI telah di revisi dari 10 menjadi 4 karena keterbatasan anggaran untuk Kegiatan ini. Indikator ini juga tidak termasuk dalam Prioritas Nasional.

Hasil Review:

Indikator Kinerja ini diusulkan untuk menjadi Prioritas Nasional dan target nya di revisi menjadi 4 KPI di Tahun 2023 dan Tahun 2024 karena keterbatasan anggaran

6. Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Negeri

Capaian:

Dari target 80 persen belanja Direktorat Perwilayahan Industri setelah dilakukan rekap pada belanja akun-akun yang ditarget realisasinya melebihi target yaitu 99,95 persen.

Analisis:

Indikator telah menggambarkan kinerja/hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta berupa outcome.

Hasil Review:

Indikator kinerja dan target kinerja masih relevan.

7. Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri

Capaian:

Dari 2 target yang ditetapkan, tercapai 2 Draft yaitu Rpermenperin industri yang dikecualikan berlokasi di KI dan Revisi Rpermenperin RKL/RPL.

Analisis:

Indikator telah menggambarkan kinerja/hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta berupa outcome.

Hasil Review:

Indikator kinerja dan target kinerja masih relevan.

8. Kawasan Industri yang dilakukan pengawasan dan pengendalian

Capaian:

Dari target 10 Kawasan Industri yang dilakukan pengawasan dan pengendalian, telah tercapai 12 Kawasan Industri yaitu KI Mitra karawang, KI Deltamas, KI Gresik, KI Taman Tekno, KI Obi, KI Subang, KI ATI, KI Pancapuri, KI Cikupamas, KI Sumber Bina Sukses, KI Sumber Karja, KI Cibinong dan KI Suryacipta Subang.

Analisis:

Indikator telah menggambarkan kinerja/hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta berupa outcome.

Hasil Review:

Indikator kinerja dan target kinerja masih relevan.

9. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah Ditindaklanjuti oleh Satker

Capaian:

Dari target 92 persen yang ditetapkan dari Kemenperin, Ditjen KPAIL telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi APIP dengan capaian 100 persen. Angka tersebut diperoleh dari sebanyak 10 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.

Analisis:

Indikator telah menggambarkan kinerja/hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta berupa outcome.

Hasil Review:

Indikator kinerja masih relevan, sedangkan target kinerja diubah untuk tahun 2023 sebesar 92 persen, mengikuti target Kemenperin.

10. Nilai SAKIP Ditjen KPAIL

Capaian:

Dari target nilai SAKIP sebesar 82, hasil penilaian SAKIP Direktorat PI tahun 2021 mendapatkan nilai 68,55.

Analisis:

Indikator telah menggambarkan kinerja/hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta berupa outcome. Namun sesuai target dalam Renstra Kementerian Perindustrian, seharusnya target nilai SAKIP tahun 2022 yaitu 78,4.

Hasil Review:

Indikator kinerja masih relevan, sedangkan target kinerja diubah untuk tahun 2023 sebesar 78,6 dan tahun 2024 sebesar 78,8.

3. Kesimpulan

Berdasarkan capaian Renstra Direktorat PI Tahun 2020-2024 sampai akhir tahun 2022 tersebut dan diskusi internal di lingkungan Ditjen KPAIL, maka dilakukan perubahan pada beberapa indikator melalui review, yaitu:

1. Fasilitasi kawasan industri dengan zona tematik: dilakukan perubahan target kinerja untuk tahun 2023 sebesar 4 kawasan industri dan tahun 2024 sebesar 5 kawasan industri.
2. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan: dilakukan perubahan target kinerja untuk tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 4 KPI
3. Nilai SAKIP Direktorat PI: dilakukan perubahan target kinerja untuk tahun 2023 sebesar 78,6 dan tahun 2024 sebesar 78,8.

4. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah Ditindaklanjuti oleh Satker: dilakukan perubahan target menjadi 92 persen untuk tahun 2023

4. Penutup

Sehubungan dengan hasil review Renstra Dit. PI 2020 – 2024 (periode 2022) tersebut di atas, maka perubahan target kinerja tersebut di atas dapat diberlakukan pada periode 2023 – 2024. Apabila terdapat kekeliruan ataupun kondisi yang memerlukan perbaikan, akan dilakukan review/ revisi/ addendum lebih lanjut. Hasil review Renstra Dit. PI 2020 – 2024 (periode 2022) ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Revisi Renstra Dit. PI Tahun 2020 – 2024 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Dirjen KPAIL Nomor 3/KPAIL/PER/II/2022.

Disusun,
Kasubbag Tata Usaha



Damayanti
Simangunsong

Jakarta, 30 Januari 2023

Disetujui,
Plt. Direktur
Perwilayahan Industri



Jonni Afrizon